

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Bab ini akan membahas temuan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan lima jurnal sebagai referensi.

Literatur Pertama berjudul “Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam menjalin Hubungan Dagang Dengan Taiwan” ditulis oleh Eni Shintia. Penelitian ini secara umum menggambarkan hubungan antara Indonesia dan Taiwan. Penelitian ini juga membahas berbagai jenis kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Taiwan antara lain kerja sama di bidang kesehatan, pertanian, teknologi, pendidikan, pariwisata dan hubungan perdagangan. Penelitian tersebut juga menggunakan tingkat analisa yang sama dengan penelitian saat ini, dimana tingkat analisa nya menggunakan tingkat analisa antar negara-bangsa. Menurut tingkat analisis ini, negara adalah pihak yang dominan dan paling kuat dalam peraturan interaksi global. Negara relatif bebas untuk menetapkan kebijakan, meskipun setiap negara harus berhubungan dengan realitas sistem dunia. Namun, pada hakekatnya negara terkecil dan terlemah sekalipun adalah aktor yang mengendalikan sistem internasional.

Literatur yang ke-dua berjudul “*The Impact of the One China Policy on Indonesia’s Diplomatic Relations with Taiwan*” ditulis oleh Sava Anisha Wahyudi. Penelitian ini menggambarkan terlebih dahulu mengenai kedaulatan yang wajib dimiliki oleh suatu negara untuk dapat pengakuan yang nantinya dapat melakukan

kerjasama dalam bentuk apapun di masa depan. Selain itu, penelitian ini membahas hubungan antara Indonesia dan Taiwan, yang tidak dapat dijalin secara diplomatik karena Indonesia mengakui kebijakan Satu China, yang dibuat oleh China. Namun dikarenakan Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif maka Indonesia tetap melanjutkan kerjasama dengan Taiwan tetapi hanya pada bidang perekonomian dan pendidikan.

Literatur ke-tiga berjudul “Implikasi Kebijakan *One China Policy* dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan” ditulis oleh Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan. Studi ini melihat bagaimana kebijakan One China berdampak pada upaya kerja sama saudara kota masing-masing daerah dua negara tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa dampak dari One China Policy sangat berpengaruh pada tingkat kerjasama di tingkat sub-state, yaitu di tingkat kota atau provinsi. Karena prinsip One China Policy yang mengatur kerjasama internasional dengan pemerintah daerah, kerjasama ini kemudian tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kecenderungan Indonesia untuk mengikuti kebijakan Satu China (*One China Policy*) dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh gagasan nasional tentang memenuhi kebutuhan sosial ekonomi antara Indonesia dan Taiwan tanpa mengganggu stabilitas hubungan Indonesia dan Taiwan. dan China.

Literatur ke-empat berjudul “Hubungan Dagang Indonesia-Taiwan Dalam Konteks Kebijakan Satu China (2014-2015) penelitian ini ditulis oleh Amanda Nabhila. Penelitian ini membahas dampak kebijakan One China Policy, yang membuat Taiwan sulit untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Menurut penelitian, Indonesia mengakui Satu China Policy hanya untuk dapat

menjalin hubungan baik dengan China dan Taiwan. Faktor utama yang mendorong Indonesia untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan politik terhadap China dan Taiwan adalah kepentingan perdagangan dan nasional, menurut penelitian ini.

Literatur ke-lima berjudul “ *The Taiwan Question and the One-China Policy : Legal Challenges with Renewed Momentum* “ ditulis oleh Li tian, Pasha Hsieh. Penelitian ini menjelaskan status Taiwan yang menjadi isu paling rumit di dalam hukum internasional maupun hubungan internasional. Permasalahan Taiwan pada dasarnya merupakan perpanjangan dari masalah “ Dua Tiongkok “ yang menimbulkan dilema untuk hukum internasional dalam mengakomodasi keberadaan Taiwan secara *de facto* di bawah kebijakan satu Tiongkok ini yang tidak jelas. Penelitian ini menganalisis tantangan hukum One China Policy yang melibatkan hubungan lintas selat dan bagaimana tantangan ini menjadi berkembang seiring berjalannya waktu. Penelitian ini beragumen bahwa Republik Tiongkok di Taiwan tidak pernah berhenti menjadi sebuah negara setelah penghentian pengakuan dan pembagian negara “ Tiongkok lama “ diantara dua rezim, yang memiliki status kenegaraan terpisah.

Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam menjalin Hubungan	Eni Shintia	Memiliki persamaan pada pembahasan tentang mengevaluasi minat pemerintah	Perbedaan terletak pada sudut pandang negara yang

Dagang Dengan Taiwan		Indonesia untuk membangun hubungan dagang dengan Taiwan	diambil dan teori yang digunakan
<i>The Impact of the One China Policy on Indonesia's Diplomatic Relations with Taiwan</i>	Sava Anisha	Memiliki persamaan pada pembahasan tentang dampak dari adanya keberadaan kebijakan One China Policy terhadap hubungan Indonesia dan Taiwan	Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang melihat akibat hambatan dari kebijakan One China Policy untuk ruang gerak taiwan
Implikasi Kebijakan <i>One China Policy</i> dalam Kegagalan Kerjasama <i>Sister City</i> antara Bogor dan Tainan di Taiwan	Muhammad Taufan Mahardika & Arif Darmawan	Memiliki persamaan pada pembahasan melihat pengimplementasian One China Policy untuk keberlangsungan kerja sama Indonesia dan taiwan	Terdapat perbedaan terletak di Teori penelitian yang digunakan dan objek kerja sama nya
(Nabhilah, 2017)	Amanda Nabhila	Memiliki persamaan pada konteks kebijakan satu china atau One China Policy untuk melihat perkembangan hubungan dagang Taiwan dengan Indonesia	Perbedaan terletak pada Teori yang digunakan dan rentan waktu penelitian serta objek kerja sama yang tidak hanya fokus pada perdagangan
<i>The Taiwan Question and the One-China Policy : Legal Challenges with Renewed Momentum</i>	Li tian, Pasha Hsieh	Memiliki persamaan pada pembahasan kedaulatan posisi Taiwan di mata negara lain serta Sejarah One China Policy terbentuk	Perbedaan terletak pada pembatasan masalah dimana penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai kerja sama dengan negara lain terutama Taiwan-Indonesia

Dari ke-lima literatur tersebut telah menjelaskan bagaimana dampak / pengaruh One China Policy terhadap ruang gerak Taiwan untuk melakukan kerja

sama dengan negara lain. Adanya One China Policy memberikan rasa ketakutan negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan dan dengan adanya One China Policy membuat status kedaulatan Taiwan dipertanyakan. Beberapa literatur diatas hanya menjelaskan mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Taiwan hanya dari sudut pandang Indonesia. Namun dari ke-lima literatur tersebut tidak memberikan penjelasan dari sudut pandang Taiwan tentang bagaimana Taiwan mengatur strategi agar dapat tetap menjalin hubungan kerja sama ditengah hambatan One China Policy. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab kerja sama Taiwan dengan Indonesia ditengah kedekatan China dengan Indonesia namun Indonesia masih tetap menjalin hubungan perekonomian dan dagang dengan Taiwan berdasarkan sudut pandang & strategi kebijakan yang digunakan oleh Taiwan.

2.2.Kerangka Teori / Konseptual

2.2.1. Kerja Sama Internasional

Hubungan Internasional yang didasarkan pada *National Interest* disebut kerja sama internasional. Kerja sama internasional terdiri dari berbagai aturan, prinsip, standar, dan proses pengambilan keputusan yang mengatur bagaimana rezim berfungsi di seluruh dunia. Negara-negara yang bekerja sama internasional biasanya memiliki tujuan bersama atau *common interest*. (Kusmawinahyu, 2022) Menurut (Holsti, Politik Internasional, 1998) kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih tujuan, kepentingan, atau prinsip bertemu dan dapat menghasilkan, mendorong, atau memenuhi sesuatu secara bersamaan.
2. Persepsi Negara yang meyakini bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan menguntungkan kepentingan dan nilai negaranya.
3. Persetujuan atas masalah yang terjadi diantara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan.
4. Peraturan resmi atau tidak resmi yang berkaitan dengan transaksi yang akan datang yang dilakukan untuk menerapkan kesepakatan.
5. Transaksi antara negara untuk mendapat sebuah persetujuan.

Karena keterbatasan suatu negara, seperti keterbatasan sumber daya alam dan teknologi, kerja sama internasional dilakukan. Negara berusaha mengatasi keterbatasan ini dengan berinteraksi dengan negara lain. Kemitraan diperlukan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama internasional dilakukan Taiwan dan Indonesia guna meningkatkan kegiatan dalam sektor perekonomian. Dengan kerja sama internasional negara dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi ataupun suatu hubungan yang baik untuk masing-masing negara. (Tambunan, 2000) Negara dan aktor internasional tidak dapat menghindari kerja sama internasional karena kehidupan manusia yang semakin kompleks dan saling ketergantungan. Kerja sama juga disebabkan oleh sumber daya yang tidak merata. Sehubungan dengan hubungan internasional, negara merupakan aktor paling utama, dalam melakukan tindakan nya dalam sebuah kerja sama negara didasari oleh

motivasi dan diarahkan melalui kebijakan internasional untuk kepentingan nasional yang diinginkan. Kerja sama internasional terbagi menjadi tiga bentuk:

1. Kerja Sama Bilateral

Merupakan kerja sama atau perjanjian yang dibuat hanya oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri

2. Kerja Sama Multilateral

Merupakan kerja sama antara lebih dari dua negara di satu wilayah.

3. Kerja Sama Regional

Merupakan perjanjian atau kolaborasi di luar batas wilayah tertentu.

Penelitian ini berkonsentrasi pada kerja sama bilateral sebagai salah satu jenis kerja sama internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya dua negara yang dapat melakukan kerja sama bilateral, dan tidak lebih. Sama halnya seperti Taiwan dan Indonesia untuk terus berupaya menjadi mitra yang strategis untuk manfaat masing-masing negara. Aktor dalam kerja sama bilateral ini Taiwan dan Indonesia yang sama-sama memiliki kepentingan untuk perekonomian masing-masing negaranya.

Hubungan bilateral menentukan bagaimana dua negara berinteraksi satu sama lain dalam hubungan internasional. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional yang memiliki kompleksitas saat dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti perekonomian dunia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan antar negara di suatu kawasan. Masing-masing negara memiliki kepentingannya sendiri, namun jika ada kepentingan yang diwujudkan bersama dengan negara lain, maka kesepakatan yang dibuat harus dilandasi dengan itikad baik dan mengedepankan

asas saling memanfaatkan berbagai makna serta mengandung sejumlah makna yang berkaitan dengan dinamika yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. (Kadarudin, 2018)

2.2.2. Neoliberalisme

'Neoliberalisme' menunjukkan bahwa neoliberalisme adalah kebangkitan atau reinkarnasi dari 'liberalisme' tradisional sebagai ideologi politik. Ini menyiratkan bahwa liberalisme telah memudar dari diskusi politik dan pembuatan kebijakan tetapi baru-baru ini muncul kembali dalam bentuk yang dimodifikasi. Atau, beberapa orang memandang neoliberalisme sebagai ideologi yang berbeda dengan akar sejarah dan kosakata dasar yang dibagikan dengan liberalisme, mirip dengan bagaimana 'neokonservatisme' berhubungan dengan konservatisme konvensional. Patut dicatat bahwa sebagian besar diskusi tentang neoliberalisme bersifat kritis, dengan sedikit perspektif simpatik atau netral. Neoliberalisme sering dilihat sebagai kebangkitan liberalisme ekonomi, yang menganjurkan intervensi negara minimal dalam ekonomi, menyerahkannya kepada pasar yang mengatur diri sendiri. Namun, liberalisme ekonomi dan neoliberalisme harus dibedakan dari liberalisme yang lebih luas, yang mendukung reformasi konstitusional dan demokratis. Analisa mengenai liberalisme secara umum disajikan sebagai latar belakang untuk memahami neoliberalisme.

Konsep 'Neoliberalisme' memiliki latar belakang sejarah yang berasal dari akhir abad ke-19 ketika digunakan oleh ekonom Prancis Charles Gide. Ini awalnya mengacu pada kebangkitan teori ekonomi liberal klasik, terutama yang terkait dengan Adam Smith. Namun, penggunaan istilah ini tetap tidak konsisten dari

waktu ke waktu. Karya panjang buku pertama yang menggunakan 'neoliberalisme' dalam judulnya adalah tesis doctoral Jacques Cros, di mana ia menggambarannya sebagai ideologi politik yang berasal dari upaya untuk menghidupkan kembali liberalisme klasik selama dan setelah Perang Dunia II. 'Neoliberal' ini menganjurkan sikap ekonomi sayap kanan, laissez-faire dibandingkan dengan liberalisme egaliter modern. Setelah Cros, istilah 'neoliberalisme' digunakan secara sporadis, terutama untuk menggambarkan situasi di Jerman, khususnya ideologi di balik 'ekonomi pasar sosial' Jerman Barat. Edgar Nawroth menganalisis upaya Kanselir Jerman Barat untuk menggabungkan ekonomi pasar dengan demokrasi liberal dan unsur-unsur ajaran sosial Katolik, melabelinya sebagai 'neoliberalisme.' Namun, Nawroth tetap kritis terhadap ideologi eklektik ini. Konsep neoliberalisme Cros dan Nawroth secara bertahap menyebar ke seluruh dunia selama tahun 1990-an. Wilfried ver Eecke berusaha mengeksport konsep ini ke dunia berbahasa Inggris, mengkarakterisasi neoliberalisme sebagai preferensi untuk intervensi negara minimal di pasar untuk melestarikannya, seperti melalui undang-undang anti-trust dan kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas harga. Di bawah pemahaman ver Eecke, neoliberalisme dicadangkan untuk jenis liberalisme tertentu yang ditandai dengan komitmen radikal terhadap kebijakan ekonomi laissez-faire, dengan pendukung seperti Mises, Hayek, Friedman, Nozick, dan Rothbard.

Neoliberalisme juga seperangkat keyakinan politik yang tidak ada batasan nya, yang paling menonjol dan protipikalnya mencakup keyakinan bahwa satu-satunya tujuan tugas negara secara resmi adalah untuk menjaga kebebasan individu, terutama komersial dan hak milik pribadi. (Mises, 1962) Terutama keyakinan ini dapat diterapkan pada tingkat dunia internasional untuk tingkatan yang sama juga

diterapkan pada sistem pasar bebas dan perdagangan bebas. Satu satunya alasan yang dapat diterima untuk mengatur perdagangan internasional adalah untuk melindungi perdagangan internasional, kebebasan komersial dan jenis hak milik yang harus diwujudkan di tingkat nasional. (Norbeg, 2001) Sebagian besar ideologi neoliberal menganut gagasan bahwa pasar secara bebas dapat mengatur pertukaran barang dan jasa. (Norbeg, 2001)

Fokus utama neoliberalisme adalah untuk mendorong negara-negara dan organisasi internasional lainnya untuk bekerja sama. Perspektif neoliberalisme ini dalam perjalanannya sering juga disebut sebagai pendekatan terkemuka untuk memahami organisasi internasional dan pola kerja sama internasional. Selain itu, pelaku neoliberalisme mencakup bukan hanya negara tetapi juga organisasi internasional, seperti Non-governmental Organizations (NGO), International Governmental Organizations (IGO), dan Multinasional Kerja Sama. Menurut ideologi neoliberal, ketika sistem internasional menjadi anarki, orang harus bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masalah yang dapat membuat mereka lebih terkait.

Krasner (1991) mengkritik bahwa kaum neoliberalisme lebih mengutamakan *intentions*, *interest*, dan *information* dibandingkan *capabilities*. Namun pandangan kaum neoliberalisme, peningkatan *capabilities* hal yang penting untuk dilakukan karena dengan kerjasama dapat membantu suatu negara untuk bertahan di dalam situasi yang anarki. Neoliberalis percaya bahwa negara akan cenderung berkerjasama satu sama lain.

Salah satu asumsi utama neoliberalisme adalah sebagai berikut: (1) Negara berperan sebagai aktor penting dalam hubungan internasional. Negara selalu

memaksimalkan kepentingannya dalam berbagai masalah sesuai dengan sifat rasional dan instrumentalnya, (2) Negara selalu berusaha memaksimalkan keinginan absolut melalui kerjasama, dan (3) Negara akan memberikan loyalitas dan sumber dayanya jika institusi tersebut dianggap memiliki kepentingan bersama untuk meningkatkan peluang untuk mengamankan kepentingan internasionalnya. (Lamy, 2001)

2.2.3. Role Theory

Role Theory Melalui bukunya yang berjudul "Study of National Role Conceptions" K. J. Holsti dengan penjelasannya mengenai Role Theory mulai menarik perhatian akademisi yang ingin menganalisis kebijakan luar negeri sebuah negara. Fokus dari Role Theori merupakan gagasan mengenai gambaran akan identitas nasional sebuah negara yang mempengaruhi perilakunya di ranah internasional. Role Theory memiliki tiga nilai dalam menjelaskan perannya dalam proses studi kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah nilai deskriptif yang memiliki banyak kosakata dalam mengkategorikan keyakinan, citra, dan identitas yang dikembangkan oleh individu maupun kelompok dalam menggambarkan peran nya, serta jenis proses dan struktur yang mengatur penyebarannya di situasi tertentu. Yang kedua adalah nilai organisasi yang secara organisasi Role Theory memungkinkan terlaksananya proses analisis yang terfokus pada semua tingkat analisis kajian kebijakan luar negeri selain menjembatani tingkatan analisis yang ada melalui orientasi proses yang menggabungkan aktor dengan struktur yang ada. Yang ketiga adalah nilai eksplanasi yang menjelaskan nilai dari Role Theory yang dapat berasal dari teori perantara yang dapat mengkaitkan definisi konseptualnya terhadap pendekatan teoritis lain. (Walter, 1981) Theodore R. Sabrin

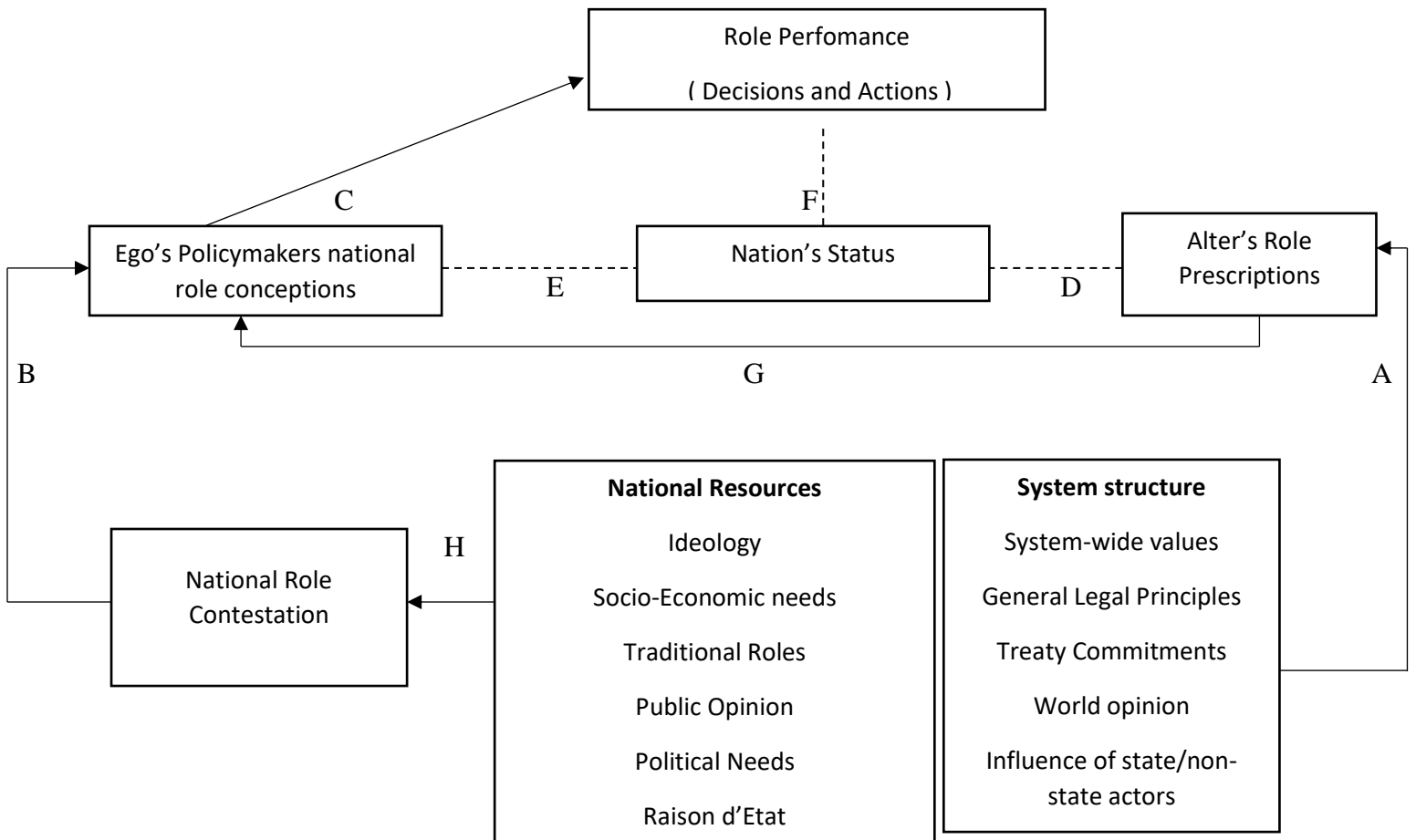
dan Allen L. Vernon mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam penggunaan Role Theory. Yang pertama adalah jumlah peran yang digunakan dalam mengidentifikasi identitas aktor. Yang kedua adalah usaha yang dilakukan aktor dalam menjalani peran yang telah dipilih melalui perilaku yang ditunjukkan. Yang ketiga adalah waktu yang dihabiskan bagi aktor dalam menjalani salah satu perannya dibandingkan peran lain yang dimiliki. (Sarbin, 1968) Variabel individu dalam studi Role Theory terdiri atas ekspektasi peran, tuntutan peran, lokasi peran, dan efek penonton. Variabel Ekspektasi peran terdiri dari norma, kepercayaan, kecenderungan yang berkaitan dengan performa aktor yang berada dalam suatu status social tertentu terhadap hubungannya dengan individu lain yang memiliki peran yang berlainan (Biddle, 1966) (Sarbin, 1968) (Stryker, 1985) Variabel Tuntutan peran memberikan kendala terhadap pilihan peran yang dimiliki oleh aktor. (Sarbin, 1968) Variabel efek penonton merupakan salah satu variable penting dalam membeberkan definisi peran dari aktor lain melalui sudut pandang orang ketiga. (Sarbin, 1968) Variabel lokasi peran merupakan variabel terakhir yang menentukan berlakunya peran yang dimiliki oleh aktor. Lokasi peran merujuk pada proses penempatan aktor diantara struktur social yang ada. Aktor harus dapat memposisikan perannya berdasarkan situasi yang sedang berlangsung. Aktor juga harus dapat menempatkan peran yang diambil dengan mempertimbangkan keberadaan aktor lain. (Sarbin, 1968)

Role Theory juga memiliki model identitas sosialnya sendiri yang didasari oleh tiga unsur yang sangat penting. Unsur pertama adalah status, mengacu pada posisi aktor dalam struktur sosial dimana aktor tersebut memiliki kewajiban, hak, dan wewenang atau kekuasaan yang sah. Posisi atau status yang dimiliki oleh aktor

memiliki implikasi terhadap sejumlah harapan normatif atas peran yang dimiliki oleh aktor, serta pemberlakuan peran tersebut oleh bagian dari aktor tersebut. Unsur kedua adalah nilai, mengacu pada seberapa relevan orang lain mengevaluasi pemberlakuan peran aktor tersebut. Unsur ketiga adalah keterlibatan, yang memiliki dua aspek lain yaitu konsep aktor yang merupakan bagian dari sebuah kelompok yang lebih besar dan jumlah upaya serta partisipasi yang ditunjukkan aktor tersebut untuk memenuhi perannya di lingkungan internasional. (Thies, 2009)

Role Theory juga berguna sebagai kerangka untuk menganalisis kebijakan negara-negara kecil. Role Theory memiliki konsep terpenting yang berkaitan dengan Role Theory, yaitu “ peran “, “ persepsi peran “, “ resep peran “, dan “ kinerja peran “. Menurut Ralph Linton “peran mewakili aspek dinamis dari suatu status. Individu secara sosial diberi suatu status dan menempatkannya dalam kaitannya dengan status-status lain. Ia menjalankan suatu peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang membentuk status. (Linton, 1936) suatu peran ditentukan oleh dirinya sendiri dan dalam beberapa hal bergantung pada ekspektasi lingkungan di mana peran itu berfungsi. Sebagaimana masyarakat dapat menentukan “ peran “ seperti apa yang ingin mereka jalankan, hal yang sama juga berlaku bagi negara. Berikut adalah tiga komponen penting dari sebuah “ peran “. Pertama seperti yang dikatakan Holsti terdapat “ resep peran “ merupakan ekspektasi komunitas internasional dalam bentuk norma dan ekspektasi budaya. Kedua “ persepsi peran “ atau konsep peran nasional yang mendefinisikan dirinya sendiri dalam hal ini seperti nilai-nilai dan sikap aktor / negara yang berinteraksi dengan negara lain. Terakhir “ kinerja peran “ adalah hasil konfrontasi antara ego dan alter yang dapat terwujud dalam bentuk hasil kebijakan luar negeri yang dapat berhasil atau tidak.

(Holsti, National Role Conceptions In The Study of Foreign Policy, 1970)
 hubungan antara “ konsepsi peran “ “ persepsi peran “,”kinerja peran “ di ilustrikan
 seperti berikut



Sumber (Holsti, National Role Conceptions In The Study of Foreign Policy, 1970)

Melihat gambar ilustrasi hubungan antara “ konsepsi peran “ “ persepsi peran “,”kinerja peran “ dapat diidentifikasi dampak variable “ innenpolitik” pada pengambilan keputusan suatu negara ditunjukkan oleh garis H=> B, garis (A) dapat dianggap sebagai peran penentu struktur internasional yang (sebagai variable independent) juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tindakan

kebijakan luar negeri disajikan pada baris (C), pada garis (E,F,D) untuk menganalisis kinerja kebijakan luar negeri suatu negara.

Role Theory sebagai Teori empiris hubungan internasional memiliki struktur logis yang mendasarinya dengan kemampuan untuk menghasilkan berbagai model kerja sama dan konflik dalam politik dunia dengan berbagai tingkat analisis:

- a.) Model Insentif dan batasan perang yang berorientasi system
- b.) Model Konsepsi peran dan harapan yang berfokus pada aktor
- c.) Model Isyarat dan penerapan peran yang berfokus pada tindakan

Penekanan pada masing-masing analisis ini adalah pada tindakan strategi yang menjadikan Role Theory sebagai teori hubungan internasional antara ego dan alter serta sebagai teori kebijakan keputusan luar negeri masing-masing. (Walker, 2017)

Jadi, Role Theory merupakan sebuah konseptual yang dapat digunakan dalam proses analisis kebijakan luar negeri yang mengacu pada analisis peran yang diambil oleh aktor individu. Peran yang dimaksudkan merupakan suatu bentuk hasil dari identifikasi aktor atas peran yang diambil aktor tersebut di lingkungan internasional.

2.3.Asumsi Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini berasumsi bahwa adanya One China Policy menjadi keraguan untuk negara lain menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Adanya figur China dibelakang Taiwan menjadi bayang-bayang Taiwan untuk kesulitan melakukan ruang gerak

yang lebih luas untuk membangun hubungan kerja sama dengan negara lain. Negara- negara di dunia yang tetap ingin memiliki hubungan kerja sama dengan Taiwan harus menghormati One China Policy, mengakui otoritas China atas wilayah Taiwan, dan mengakui China sebagai wakil sah dari pemerintah Taiwan di tingkat global. Oleh karena itu, negara mana pun yang ingin tetap berhubungan diplomatik dengan China wajib menghormati keputusan kebijakan One China Policy. Dengan demikian, Taiwan menjadi lebih kecil di mata internasional, terutama dalam hal membangun hubungan diplomatik dan pengakuan internasional. Namun Real Theory menganggap bahwa negara kecil yang memiliki keterbatasan menjadikan negara tersebut rentan terhadap ancaman “ lingkungan “ sehingga negara dapat melampaui kemampuan status “ kecil “ nya dan dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang relatif sukses dengan awalan yang bijaksana

2.4 Kerangka Analisis

